



LAPORAN KINERJA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022



INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka penyusunan LAK BPK guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPK periode 2020 - 2024. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good and clean government*

serta sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Perhatian pemilik kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap kinerja pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Kondisi ini kian menguatkan semangat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi BPK "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang ditandatangani Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo merupakan pengejawantahan atas sasaran strategis BPK guna mewujudkan visi dan misi BPK.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya membangun kultur organisasi perwakilan yang lebih baik agar kepercayaan pemilik kepentingan terhadap kinerja BPK semakin meningkat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Gorontalo, 30 Januari 2023

Kepala Perwakilan

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA

NIP 196701131988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	10
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	12
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	12
2. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	13
3. SARANA DAN PRASARANA	14
E. ISU STRATEGIS.....	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	21
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	21
B. TARGET KINERJA.....	24
1. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2022</i>	24
2. <i>Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022</i>	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	28
A. HASIL EVALUASI AKIP	28
B. CAPAIAN KINERJA	30
1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022	30
2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR	30
3. PERBANDINGAN CAPAIAN IK TAHUN 2022 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN	
32	
4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IK TAHUN 2022.....	33
C. ANALISIS EFISIENSI	53
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA	54

E. REALISASI ANGGARAN	55
F. INOVASI	56
G. PENGHARGAAN	58
BAB IV PENUTUP.....	59
A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM	59
B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR	59
C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IK TAHUN 2022	62
D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2023	64
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

TABEL 1	NILAI EKA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022	14
TABEL 2	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 ...	26
TABEL 3	CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022	30
TABEL 4	PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR.....	31
TABEL 5	PERBANDINGAN REALISASI IK TAHUN 2022 DENGAN TARGET KINERJA LIMA TAHUN.....	32
TABEL 6	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 1 TAHUN 2020-2024.....	34
TABEL 7	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 2 TAHUN 2020-2024.....	35
TABEL 8	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 3 TAHUN 2020-2024.....	37
TABEL 9	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 4 TAHUN 2020-2024.....	38
TABEL 10	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 5 TAHUN 2020-2024.....	40
TABEL 11	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 6 TAHUN 2020-2024.....	41
TABEL 12	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 7 TAHUN 2020-2024.....	42
TABEL 13	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 8 TAHUN 2020-2024.....	43
TABEL 14	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 9 TAHUN 2020-2024.....	45
TABEL 15	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 10 TAHUN 2020-2024.....	47
TABEL 16	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 11 TAHUN 2020-2024.....	49
TABEL 17	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 12 TAHUN 2020-2024.....	50
TABEL 18	PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 13 TAHUN 2020-2024.....	52
TABEL 19	PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN, RINCIAN OUTPUT, DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022	56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	10
GAMBAR 2	KANTOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	15
GAMBAR 3	MESS PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	16
GAMBAR 4	RUMAH JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI GORONTALO.....	16
GAMBAR 5	RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON III	17
GAMBAR 6	RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON IV	17
GAMBAR 7	MUSHOLA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	17
GAMBAR 8	KENDARAAN DINAS KEPALA PERWAKILAN	18
GAMBAR 9	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN.....	18
GAMBAR 10	MOTOR DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN	19
GAMBAR 11	PETA STRATEGI AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI	25
GAMBAR 12	PETA STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bagian Keenam Pelaporan Kinerja Pasal 18 (1) yang menetapkan antara lain bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang terakhir kali diubah melalui Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kesembilan Belas Pasal 735 ayat (1) yang menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI, dan Pasal 736 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

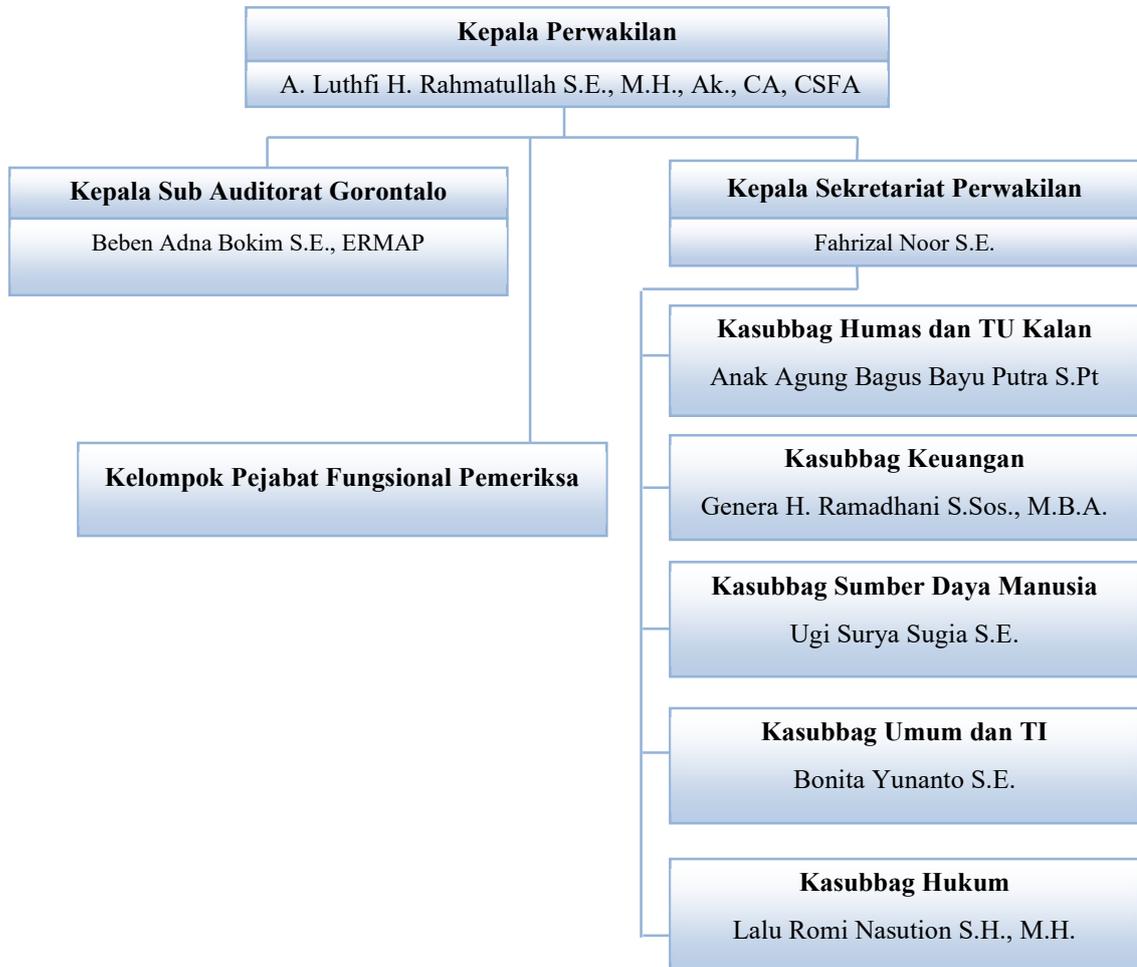
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 di atas, sesuai Pasal 737 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kecuali Pemeriksaan Investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
13. Penyiapan bahan perumusan bahan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai delapan pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Umum dan TI, Kepala Bagian Humas dan TU Kalan, dan Kepala Sub Bagian Hukum.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah unsur pelaksana BPK. Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Sub Auditorat Gorontalo

Sub Auditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta

sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI dan Auditorat Utama Investigasi.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki SDM per 31 Desember 2022 sebanyak 103 orang terdiri atas 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 29 Calon PNS, dan 23 Tenaga Tidak Tetap. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas delapan pejabat struktural yaitu

Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Sub Bagian Umum dan TI, 27 orang pemeriksa, 16 orang penunjang, dan 29 calon PNS. Selain PNS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh tenaga tidak tetap berjumlah 23 orang yang terdiri atas satu orang tenaga administrasi, 13 orang satuan pengamanan (Satpam), empat orang pengemudi, dua orang tenaga medis yang terdiri atas dokter dan perawat, dua orang tenaga teknisi, serta satu orang tenaga resepsionis.

Ditinjau dari masa kerja PNS di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masa kerja seluruh PNS dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Masa kerja 4 tahun ke atas sebanyak lima orang
- b. Masa kerja 2 s.d. 4 tahun sebanyak 26 orang
- c. Masa kerja 2 tahun ke bawah sebanyak 49 orang

2. SUMBER DAYA KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh anggaran sebesar Rp14.708.811.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.510.358.196,00 atau 98,65% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun 2021 yakni anggaran sebesar Rp14.691.502.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.102.480.219,00 atau 95,99%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 15 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp14.049.021.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp14.708.811.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Hasil pengukuran atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal BPK.

Pengukuran EKA menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai nilai sebesar 86,51% dengan rincian komponen pendukung sebagai berikut.

Tabel 1 Nilai EKA BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
98,65%	100%	99,89%	53,37%	86,51%

Berdasarkan evaluasi tersebut, nampak bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih memerlukan peningkatan dalam hal efisiensi anggaran perwakilan meskipun capaian tersebut masih berada di atas capaian rata-rata nilai efisiensi Auditorat Utama Keuangan Negara VI yaitu 51,90%.

Sedangkan untuk nilai EPA, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 95,33%. Dua hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perwakilan, dan dikomunikasikan dengan Biro Keuangan untuk mendapat *insight* tentang bagaimana meningkatkan nilai efisiensi serta nilai EPA pada tahun 2023.

3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai sebagai berikut.

a. Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga bidang tanah pada lokasi berbeda yaitu :

- 1) Seluas 3.485 m² di Jln. Brigjen Piola Isa diperoleh pada tahun 2012 digunakan untuk Mess Pegawai serta Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II.
- 2) Seluas 5.931 m² di Jln. Tinaloga Nomor 3 diperoleh pada tahun 2009 digunakan untuk gedung kantor, poliklinik, ruang olah raga, dan gudang.
- 3) Seluas 6.450 m² di Jln. Tinaloga No. 3 (disebelah Kantor) diperoleh tahun 2016, tanah tersebut masih kosong dan direncanakan akan dibangun Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian tanah seluruhnya seluas 15.866m².

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terletak di Jln. Tinaloga Nomor 3, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, mulai ditempati pada awal tahun 2011. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur/bagian depan kantor berbatasan dengan Jln. Tinaloga/Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sedangkan sebelah Selatan dengan Kantor Pengadilan Tinggi dan Barat berbatasan dengan areal persawahan. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu:

- 1) Lantai pertama seluas 926 m².
- 2) Lantai dua seluas 1.352 m².
- 3) Lantai tiga seluas 838 m².

Gambar 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



c. Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada tahun 2012 dibangun Mess dua lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 325 m². Fasilitas Mess terdiri atas 19 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, ruang makan, *lobby*, dan ruang pengelola.

Gambar 3 Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



d. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, pada tahun 2013 mulai dibangun Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas masing-masing kurang lebih 200 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas dua kamar tidur utama, dua kamar tidur tamu, dua kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.

Gambar 4 Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo



e. Rumah Jabatan Struktural Eselon III dan IV

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2018 memiliki tujuh unit rumah jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak dua unit dan struktural eselon IV sebanyak lima unit. Rumah jabatan tersebut dibangun pada tahun 2015, seluruh rumah jabatan telah dihuni sejak tahun 2016.

Gambar 5 Rumah Jabatan Struktural Eselon III



Gambar 6 Rumah Jabatan Struktural Eselon IV



f. Fasilitas Ibadah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Mushola seluas 40 m² yang diberi nama Al Muhajirin yang dibangun pada tahun 2016. Mushola tersebut terletak disebelah barat gedung kantor atau disamping garasi mobil.

Gambar 7 Mushola BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



g. Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai kendaraan dan peralatan penunjang operasional, antara lain berupa kendaraan roda empat sebanyak delapan unit dan kendaraan roda empat sebanyak delapan unit dan kendaraan roda dua sebanyak sembilan unit, sembilan alat ukur universal, dua belas mesin ketik listrik, PC 89 unit, notebook 21 unit, printer 50 unit, kalkulator 34 unit, mesin fotokopi enam unit, proyektor LCD 18 unit, scanner 46 unit dan *lift* 1 unit.

Gambar 8 Kendaraan Dinas Kepala Perwakilan



Gambar 9 Kendaraan Dinas Operasional Perwakilan



Gambar 10 Motor Dinas Operasional Perwakilan



E. ISU STRATEGIS

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan isu strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024. Isu strategis yang dimaksud adalah terkait dengan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang masih rendah, berada di angka 69,78% (enam puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) per Semester I 2022 atau masih di bawah target BPK keseluruhan yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama dan menjadi perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengingat bahwa sasaran strategis dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Renstra 2020-2024 adalah Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis tersebut ditetapkan indikator yang salah satunya adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan analisis untuk mengetahui penyebab masih rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan diketahui antara lain adalah:

1. Komitmen

Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh OPD/Entitas.

2. Pemahaman Terbatas

Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas.

3. Perubahan Regulasi

Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.

4. Subjek PTL Tidak Ada

Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, antara lain

1. Menindaklanjuti rekomendasi secara *realtime* tanpa harus menunggu akhir semester;
2. Diperlukan komitmen tinggi dan dukungan Kepala Daerah dan Inspektur untuk terus mengawal dan mendorong seluruh satuan kerja;
3. Memberikan rekomendasi yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive* (SMART) untuk dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa dan berdampak positif pada capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 telah dibuat namun masih dalam proses penetapan dalam satu Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis.

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UUD 1945, BPK pada periode 2020-2024 akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

2. Misi

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan Misi 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

5. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan,

akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

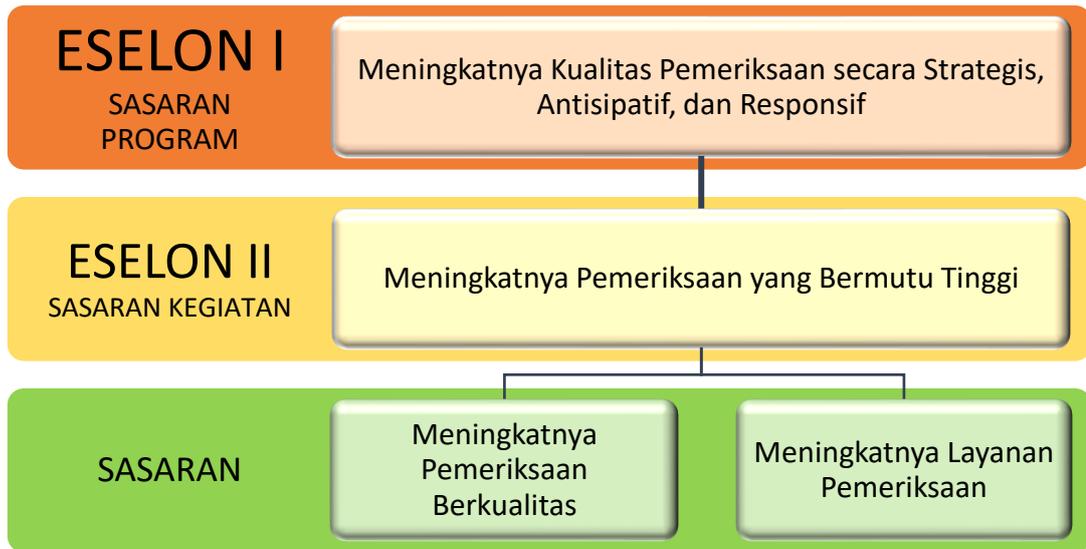
Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. TARGET KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

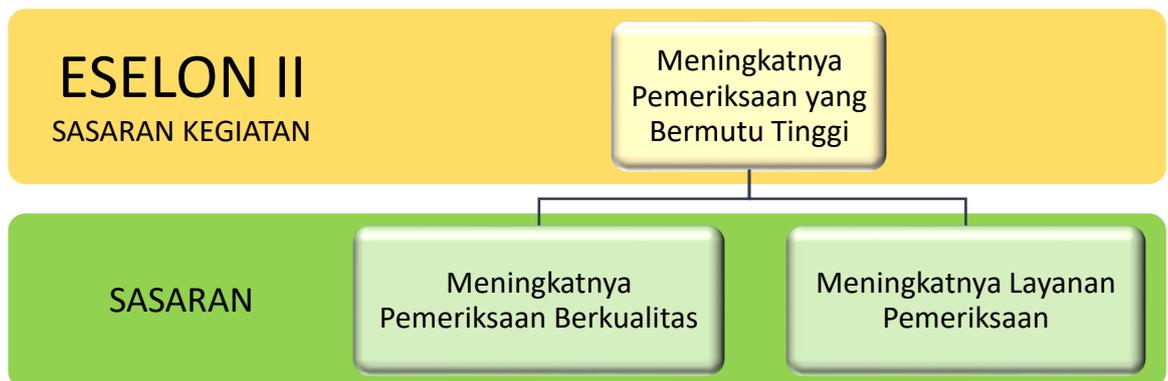
Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai kepanjangan BPK untuk wilayah Timur menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai tahun 2022. Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Keterkaitan tugas dan fungsi AKN VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis AKN VI berikut ini.

Gambar 11 Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selaku satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berikut.

Gambar 12 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaian IK tahun 2022. IK beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Ketua BPK, Wakil ketua BPK, Anggota VI BPK, Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan

BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember tahun 2021. Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dimuat pada tabel berikut.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp14.049.021.000,00	1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp4.304.877.000,00	2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp9.744.144.000,00	3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13.	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan pencapaian atas 13 Indikator Kinerja, yang terdiri atas:

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memanfaatkan anggaran yang diberikan sebesar Rp14.708.811.000,00 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Rencana aksi pencapaian target kinerja memuat rincian kegiatan yang mendukung pencapaian tiap IK setiap triwulan secara rinci dan lengkap yang dapat menggambarkan upaya BPK Perwakilan Provinsi dalam mencapai target indikator kinerja. Pada rencana aksi memuat angka target setiap triwulanan dengan mempertimbangkan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam PK. Hal ini tampak antara lain pada IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah dengan meningkatkan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) serta pada IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Rencana aksi secara rinci disajikan pada lampiran 1.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. HASIL EVALUASI AKIP

Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan mendapatkan nilai sebesar **93,15** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**, dengan hasil evaluasi untuk masing-masing komponenn adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

Capaian organisasi pada komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 30 atau 100% dari bobot 30. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi seluruh sub komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen perencanaan kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen perencanaan kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Capaian organisasi pada komponen pengukuran kinerja mendapatkan nilai 23,75 atau 95% dari bobot 25. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih melakukan monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan individu secara tahunan. Inspektorat Utama merekomendasikan agar pelaksanaan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV, dan individu dapat dilakukan secara berkala. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan berupaya terus melakukan peningkatan koordinasi melalui laporan bulanan serta melakukan diskusi dan *focus grup discussion* secara rutin setiap bulan yang dihadiri oleh Eselon IV dan Eselon III untuk melihat capaian kinerja dari tiap individu pada setiap unit kerja.

3. Pelaporan Kinerja

Capaian organisasi pada komponen pelaporan kinerja mendapatkan nilai 12,63 atau 84,20% dari bobot 15. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam LAKIN yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target tahun berjalan dan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra, namun belum menyajikan perbandingan antara realisasi dan capaian tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya. Selain itu LAKIN yang disusun hanya menjelaskan mengenai efisiensi pada anggaran dan belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya lainnya. Inspektorat Utama merekomendasikan agar meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi dan capaian tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya serta menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja

4. Evaluasi Internal

Capaian organisasi pada komponen evaluasi internal mendapatkan nilai 10,00 atau 100,00% dari bobot 10,00. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi seluruh sub komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen evaluasi internal. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen evaluasi internal.

5. Capaian Kinerja

Capaian organisasi pada komponen capaian kinerja mendapatkan nilai 16,77 atau 83,85% dari bobot 20,00. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga target tahun berjalan yang tidak tercapai serta terdapat delapan capaian kinerja tahun berjalan yang tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Inspektorat Utama merekomendasikan agar meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memfokuskan pada IK yang belum tercapai pada tahun sebelumnya dengan meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan IK tersebut.

B. CAPAIAN KINERJA

1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian kinerja Tahun 2022. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota VI BPK, Tortama KN VI selaku Eselon I, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember tahun 2021. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target dan realisasi Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dimuat pada tabel berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No. (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,75%	83,75
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	69,78%	93,04
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,68%	100,68
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,07%	100,07
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,51%	100,51
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Memuaskan (4,80)	96,00
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (93,15)	105,00
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	90,27%	93,07
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,00%	100,00
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,65)	96,05
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	90,04%	102,32
Total Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo				97,87

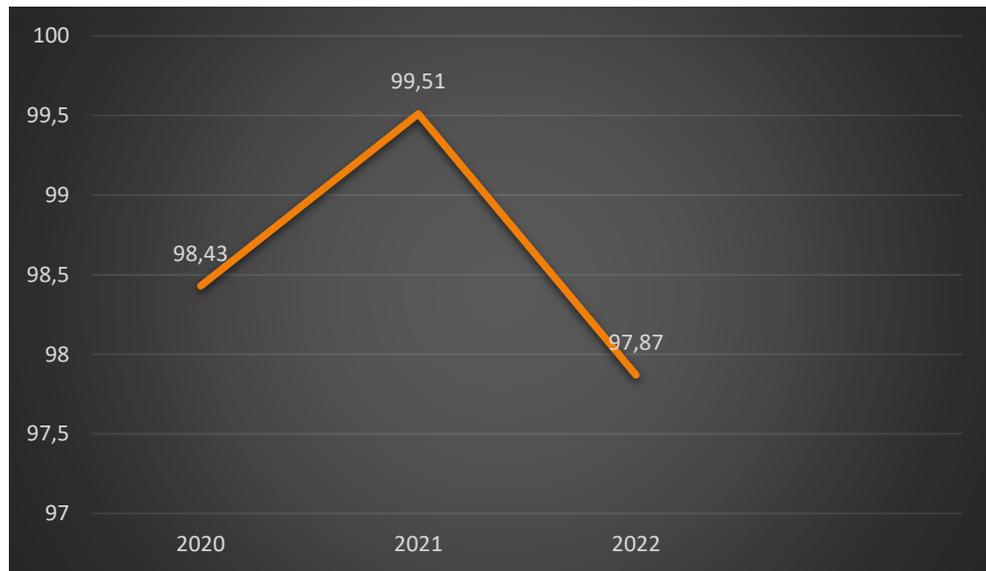
*Data berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I

2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan skor lima tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan karena sejak tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah menggunakan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BPK periode 2020 – 2024, berbeda dengan tahun 2019 yang

masih menggunakan indikator kinerja sesuai Renstra periode 2016 – 2020 sebelumnya. Hasil capaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 97,87. Skor tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,51 dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,43. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.

Grafik 1 Tren Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan atas pencapaian kinerja dibandingkan dua tahun terakhir. Terdapat lima IK yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2022. Meskipun secara rata-rata capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, apabila dilihat secara keseluruhan mayoritas IK mencapai target kinerja pada tahun 2022. IK yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021, yaitu IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IK 6 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dan IK 8 Hasil Evaluasi AKIP.

Adapun rincian pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Perbandingan Capaian Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Realisasi Tahun 2020 (3)	Realisasi Tahun 2021 (4)	Realisasi Tahun 2022 (5)	Target Tahun 2022 (6)
Meningkatnya Pemeriksaan	IK 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	71,43%	86,25%	83,75%	100%

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Realisasi Tahun 2020 (3)	Realisasi Tahun 2021 (4)	Realisasi Tahun 2022 (5)	Target Tahun 2022 (6)
yang Bermutu Tinggi	IK 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%	100%
	IK 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	76,31%	72,83%	69,78%*	75%
	IK 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,40%	100,00%	100,68%	100%
	IK 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,60%	100,07%	100%
	IK 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	101%	100,30%	100,51%	100%
	IK 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Memuaskan (4,47)	Memuaskan (4,41)	Memuaskan (4,80)	Sangat Memuaskan (5,00)
	IK 8. Hasil Evaluasi AKIP	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)	A (88,00)
	IK 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,66%	99,66%	90,27%	97%
	IK 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	125%	137,50%	100,00%	100%
	IK 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,47)	Memuaskan (3,89)	Memuaskan (3,65)	Memuaskan (3,80)
	IK 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00%	100%
	IK 13. Tingkat Kinerja Anggaran	89,34%	92,43%	90,04%	88,00%
	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo		98,43	99,51	97,87

*Data berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I

3. PERBANDINGAN CAPAIAN IK TAHUN 2022 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN

Perbandingan capaian IK tahun 2022 dengan target kerja lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi IK Tahun 2022 dengan Target Kinerja Lima Tahun

No. (1)	Indikator Kinerja (2)	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022 (8)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024) (9)
		2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)		
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	83,75%	83,75%
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	69,78%*	93,04%
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,68%	100,68%
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,07%	100,07%
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,51%	100,51%
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80)	96,00%

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (87)	A (87)	A (87)	AA (93,15)	107,07%
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	96%	96%	90,27%	94,03%
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,65	96,05%
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88,00%	87,50%	87,50%	90,04%	102,90%

*Data berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I

4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IK TAHUN 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat lima Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2022 yakni IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, dan IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing IK sebagai berikut.

a. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Aktivitas pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* dilaksanakan dengan cara melaksanakan *quality control* mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh seluruh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab di setiap penugasan serta melaksanakan *quality assurance* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Kepala Sub Auditorat dan Kepala Perwakilan untuk seluruh pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mewajibkan tim pemeriksa

untuk menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai petunjuk pelaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan, dan menyimpan kertas kerja tersebut secara elektronik maupun secara fisik.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase dari 40% dikalikan hasil QA dan QC Satker ditambah 50% dikalikan hasil evaluasi EPP ditambah 10% dikalikan hasil reviu Itama. Sumber data yang digunakan adalah dokumen lembar checklist QA dan QC, hasil evaluasi EPP, dan hasil reviu Itama. Adapun perkembangan capaian IK 1 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Perkembangan Capaian IK 1 Tahun 2020-2024

IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,43%	86,25%	83,75%		
Capaian	71,43%	86,25%	83,75%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			83,75%		

Realisasi IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 83,75% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 83,75%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 86,25%. Realisasi IK 1 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 baru mencapai 83,75%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu belum berjalan secara optimal. Meskipun telah mengupayakan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum dapat memperoleh hasil evaluasi yang memadai dari Direktorat EPP sehingga skor yang dicapai tahun 2022 masih berada pada angka 83,75%, dari target sebesar 100%.

Masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam setiap LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini membuat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan semakin berusaha memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan QA dan QC agar kualitas pemeriksaan dan LHP dapat senantiasa terjaga, sehingga tahun 2023 dapat menaikkan capaian skornya sesuai target yang ditetapkan.

b. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini yaitu:

1. Rapat Koordinasi untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan, memastikan tercapainya simpulan LHP di Perwakilan Gorontalo sesuai harapan penugasan yang telah ditetapkan dalam P2;
2. Memastikan penyusunan P2 LHP (terinci) secara berjenjang;
3. Melaksanakan reviu berjenjang Penyusunan P2 LHP (terinci);
4. Memastikan Hasil Pemeriksaan LKPD dengan simpulan yang telah sesuai dengan P2.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dibagi jumlah LHP yang diterbitkan. Sumber data yang digunakan adalah laporan evaluasi EPP. Adapun perkembangan capaian IK 2 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7 Perkembangan Capaian IK 2 Tahun 2020-2024

IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100%		

Realisasi IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mencapai

nilai yang sama dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100%. Realisasi IK 2 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan saat itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga agar seluruh simpulan dari LHP sesuai dengan harapan penugasan pimpinan atau 100% untuk seluruh LHP, dan target 100% dapat dipertahankan secara konsisten sampai dengan tahun 2022. Untuk menjaga capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan peningkatan kualitas QA dan QC, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.

c. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Aktivitas dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah dengan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini bermanfaat dalam: (i) mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK; (ii) mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK; (iii) mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut; dan (iv) menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibagi jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*. Sumber data yang digunakan adalah data dari aplikasi SMP. Adapun perkembangan capaian IK 3 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Perkembangan Capaian IK 3 Tahun 2020-2024

IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76,31%	72,83%	69,78%*		
Capaian	101,75%	97,11%	93,04%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			93,04%		

*Data berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I

Realisasi IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 69,78% dari target sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 93,04%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 72,83%. Realisasi IK 3 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 baru mencapai 93,04%. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan belum berjalan secara optimal.

Capaian ini tidak memenuhi target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 75%. Hal tersebut terjadi karena antara lain Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah belum optimal mengintruksikan Inspektorat Daerah/SOPD/BUMD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan serta belum tumbuhnya kesadaran terkait pentingnya perbaikan penyelesaian TLRHP BPK di lingkungan Pemda. Pada periode Renstra 2020 – 2024, di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sempat mencapai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 76,31%, dan capaian ini menurun pada tahun 2021 menjadi 72,83%.

Untuk menjamin agar capaian di tahun berikutnya dapat memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan semakin meningkatkan pemahaman Pemda tentang pentingnya penyelesaian TLRHP BPK dalam setiap pertemuan dan menyampaikan surat kepada para Kepala Daerah dan instansi daerah terkait sebanyak dua kali dalam setahun serta meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui aplikasi SiPTL. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

d. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang, tugas, dan fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satuan kerja sebagai koordinator. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan terus berpartisipasi dalam setiap pemeriksaan tematik nasional selama tahun 2022.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase realisasi pemeriksaan tematik nasional dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional ditambah alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Sumber data yang digunakan adalah dokumen LHP pemeriksaan tematik dan RKP pemeriksaan. Adapun perkembangan capaian IK 4 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Perkembangan Capaian IK 4 Tahun 2020-2024

IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,40%	100,00%	100,68%		
Capaian	100,40%	100,00%	100,68%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,68%		

Realisasi IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 100,68% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,68%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 melebihi nilai pada tahun sebelumnya sebesar 100,00%. Realisasi IK 4 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional telah berjalan secara keseluruhan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai tahun 2020, meskipun sejak periode Renstra 2016 – 2020 sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh pemeriksaan tematik nasional, yaitu dengan berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Sama seperti tahun 2021, pada tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara konsisten berpartisipasi aktif dalam setiap pemeriksaan tematik nasional, sehingga capaian IK ini bisa tetap mencapai target seperti tahun 2021.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait pelaksanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman serta strategi nasional pencegahan korupsi. Untuk tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

e. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase realisasi jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dibagi seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa. Sumber data yang digunakan adalah surat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, syarat tugas

pemeriksaan, LHP, dan surat keluar penyampaian LHP. Adapun perkembangan capaian IK 5 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 Perkembangan Capaian IK 5 Tahun 2020-2024

IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,60%	100,07%		
Capaian	100%	100,60%	100,07%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,07%		

Realisasi IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100,07% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,07%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 100,60%, namun tetap mencapai target pada Tahun 2022. Realisasi IK 5 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas pemeriksaan dari para pemangku kepentingan telah berjalan secara keseluruhan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan secara konsisten dicapai sesuai target pada tahun 2020 dan tahun 2021. Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk dapat memenuhi 100% permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, meskipun sampai tanggal 31 Desember 2022 tidak ada permintaan yang masuk. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi setiap permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan.

f. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah

atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase realisasi jumlah permintaan tematik lokal dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal. Sumber data yang digunakan adalah LHP pemeriksaan tematik dan RKP pemeriksaan. Adapun perkembangan capaian IK 6 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Perkembangan Capaian IK 6 Tahun 2020-2024

IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101%	100,30%	100,51%		
Capaian	101%	100,30%	100,51%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,51%		

Realisasi IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 100,51% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,51%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 100,30%. Realisasi IK 6 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan secara konsisten dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai Renstra 2020 - 2024 sehingga capaian pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mencapai target 100% yang ditetapkan.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini pada tahun 2022 adalah dengan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga capaian Indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,51%. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan

terus melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan rencana yang dilampirkan dalam periode Renstra 2020 – 2024.

g. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Metode pengukuran IK adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, dan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survei pengukuran indikator. Adapun perkembangan capaian IK 7 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 Perkembangan Capaian IK 7 Tahun 2020-2024

IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,47	4,41	4,80		
Capaian	89,40%	88,20%	96,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			96,00%		

Realisasi IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar 4,80 dari target sebesar 5,00, sehingga capaiannya sebesar 96,00%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 4,41. Realisasi IK 7 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 96,00%. Meskipun telah melaksanakan upaya untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru mendapatkan skor 4,80 dari target skor 5,00. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai dasar yang ditanamkan dan diterapkan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan.

IK ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru memperoleh nilai 4,65, masih belum mencapai target yang

diharapkan yaitu 5,00. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, diharapkan agar BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai nilai 5,00 sesuai yang ditargetkan oleh BPK secara keseluruhan nasional, meskipun pada tahun 2020, 2021, dan 2022 capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum memenuhi target karena masih di bawah skor 5,00.

Capaian ini akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap tahun dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

h. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan yaitu AA adalah Sangat Memuaskan (>90-100), A adalah Memuaskan (>80-90), BB adalah Sangat Baik (>70-80), B adalah Baik (>60-70), CC adalah Cukup (>50-60), C adalah Kurang (>30-50), D adalah Sangat Kurang (0-30). Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Metode pengukuran IK adalah dengan penilaian evaluasi dari Itama. Sumber data yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP oleh itama. Adapun perkembangan capaian IK 8 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Capaian IK 8 Tahun 2020-2024

IK 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (87,00)	A (87,00)
Realisasi	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)		
Capaian	109,59%	104,78%	105,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			107,07%		

Realisasi IK 8 Hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah sebesar 93,15 dari target sebesar 88,00, sehingga capaiannya sebesar 105,00%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya

sebesar 91,16. Realisasi IK 8 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 107,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan AKIP yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan sangat baik dan optimal sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan serta meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai nilai AA sesuai dengan target yang diharapkan, serta masuk ke dalam jajaran sepuluh besar unit kerja dengan hasil evaluasi terbaik di BPK secara nasional. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan nilai evaluasi dari Inspektorat Utama BPK.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mengupayakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara tertib dan memperhatikan arahan-arahan dari Itama BPK serta menjalin komunikasi intensif dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan.

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memang melampaui target kinerja dengan memperoleh predikat AA dari target A yang diharapkan pada tahun 2022, namun untuk menjaga capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi Itama.

i. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 30% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan dasar, ditambah 25% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum, ditambah 40% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan, ditambah 5% dikalikan Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan. Sumber data yang digunakan adalah laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI. Adapun perkembangan capaian IK 9 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14 Perkembangan Capaian IK 9 Tahun 2020-2024

IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	96%	96%
Realisasi	99,66%	99,66%	90,27%		
Capaian	104,91%	103,81%	93,07%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			94,03%		

Realisasi IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 adalah sebesar 90,27% dari target sebesar 97%, sehingga capaiannya sebesar 93,07%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 99,66%. Realisasi IK 9 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 94,03%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum berjalan secara optimal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tingkat pemanfaatan TI sebesar 99,59%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk terus mempertahankan tingkat pemanfaatan TI agar dapat berada di atas angka 96%, dan target ini dapat dicapai selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Berdasarkan hasil laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih kurang optimal dalam pemanfaatan layanan aplikasi SiAP untuk penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan aplikasi Jasmin untuk tindak lanjut surat masuk.

BPK Perwakilan Gorontalo akan terus mengupayakan agar capaian yang diperoleh bisa meningkat tahun berikutnya dengan terus mendorong dan

melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan. BPK Perwakilan Gorontalo bahkan telah memiliki portal internal yang dinamakan GOROPS, sebagai sarana *data sharing* untuk memperlancar pekerjaan di setiap subbagian di bawah Sekretariat Perwakilan serta Subauditorat Gorontalo.

j. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 50% dikalikan tingkat penyusunan *best practice*, ditambah 25% dikalikan tingkat penerapan *best practice*, ditambah 25% dikalikan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen

pengetahuan. Sumber data yang digunakan adalah laporan pelaksanaan manajemen pengetahuan yang mencakup usulan *best practice*, laporan atas penerapan *best practice*, dan laporan atas pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Adapun perkembangan capaian IK 10 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan Capaian IK 10 Tahun 2020-2024

IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	125%	137,50%	100,00%		
Capaian	125%	137,50%	100,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,00%		

Realisasi IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 137,50%, namun tetap mencapai target pada Tahun 2022. Realisasi IK 10 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara keseluruhan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai tahun 2020. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen mencapai tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 100%, dan target tersebut dapat dilampaui selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 di mana capaian tingkat penerapan manajemen pengetahuan bisa mencapai nilai 125% dan 137,50%.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai *best practice* selama pemeriksaan serta menyusun dan menyampaikan usulan *best practice* kepada Ditama Revbang. Untuk usulan *Best Practice* yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan *sharing knowledge* pada pihak lain.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh capaian sebesar 100% dari target 100%, dengan memberikan usulan *best practice* terkait

optimalisasi portal satuan kerja serta melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait diklat LKPD, forum berbagi pengetahuan, reuiu pasca aktivitas, dan pelaksanaan mentoring CPNS.

Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

k. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Aktivitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dapat mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan serta menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut.

Metode pengukuran IK adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, 4,00 - 5,00 adalah sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survei pengukuran indikator. Adapun perkembangan capaian IK 11 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IK 11 Tahun 2020-2024

IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,47	3,89	3,65		
Capaian	91,32%	102,37%	96,05%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			96,05%		

Realisasi IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar 3,65 dari target sebesar 3,80, sehingga capaiannya sebesar 96,05%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 3,89. Realisasi IK 11 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 baru mencapai 96,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan para pemangku kepentingan perlu mendapat perhatian.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai nilai kepuasan 3,80 atau dengan predikat “Memuaskan” dari para pemangku kepentingan. Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 3,89. Namun pada tahun 2022 berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dengan capaian sebesar 3,65.

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK, serta menjaga kualitas hubungan dan komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo. Termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.

I. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- 1). Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);

- 2). Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU Nomor 5/2014); dan
- 3). Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam dua tahun atau 40 jam pelajaran dalam satu tahun serta melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat dibagi jumlah seluruh pegawai. Sumber data yang digunakan adalah bezzeting pegawai, SK mutasi, nota dinas penempatan, sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pusdiklat, biro sdm, dan institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satuan kerja, serta sertifikat KTF atau *in house training* yang diadakan oleh satuan kerja dengan persetujuan Badiklat PKN. Adapun perkembangan capaian IK 12 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17 Perkembangan Capaian IK 12 Tahun 2020-2024

IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100,00%		
Capaian	100%	100%	100,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,00%		

Realisasi IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar

100%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 sama dengan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 100%. Realisasi IK 12 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas jam diklat pengembangan kompetensi oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara baik.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi target jam pelajaran yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai.

Untuk ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh internal BPK maupun oleh pihak ketiga yang relevan.

m. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Capaian output
2. Penyerapan anggaran
3. Efisiensi; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 60% dikalikan nilai EKA ditambah 40% dikalikan nilai EPA. Sumber data yang digunakan adalah rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran (Biro Keuangan). Adapun perkembangan capaian IK 13 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18 Perkembangan Capaian IK 13 Tahun 2020-2024

IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88,00%	87,50%	87,50%
Realisasi	89,34%	92,43%	90,04%		
Capaian	102,69%	105,63%	102,32%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			102,90%		

Realisasi IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 90,04% dari target sebesar 88,00%, sehingga capaiannya sebesar 102,32%. Realisasi IK ini pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 92,43%, namun capaian ini masih memenuhi target yang telah ditetapkan tahun 2022. Realisasi IK 13 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 102,90%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara baik dan optimal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat kinerja anggaran sebesar 87,78%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan capaian tingkat kinerja anggaran agar minimal dapat di atas 87,50%, dan selama

dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 serta tahun 2021 target tersebut dapat dilampaui.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan serta melaksanakan evaluasi berkala atas pemanfaatan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Untuk tetap menjaga capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a) Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.
 - b) Merubah metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

(SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.

- c) Pemanfaatan portal satuan kerja BPK Gorontalo untuk mengunggah usulan *best practice*. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi unit kerja lain dalam melakukan koordinasi terkait usulan *best practice*.

2. Pengelolaan BMN,

Upaya yang dilakukan untuk efisiensi adalah melakukan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan, antara lain yaitu komputer, laptop, AC, dan printer.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

Budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama ini telah menerapkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, sesuai arahan dari Presiden RI dengan meluncurkan Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, yaitu ASN yang BerAKHLAK, yang memiliki makna Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ikut serta dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN tersebut kepada seluruh pegawai.

Budaya kerja yang pertama kali diterapkan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah HEBAT (Hormat, Efektif dan Efisien, Bersih, Amanah, dan

Terampil). Pada dasarnya budaya kerja dan mekanisme kerja yang telah diterapkan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan sangat baik. Namun dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dilakukan perubahan budaya kerja menjadi TINEPO (Terampil, Integritas dan Independensi, Nyaman, Empati, Profesional, Kolaborasi).

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya mempertahankan sekaligus terus meningkatkan budaya kerja yang telah terbangun selama ini dengan menumbuhkan rasa saling peduli, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar BPK yang telah tertanam sebelumnya. Budaya kerja yang telah berjalan dengan baik ini akan ikut memunculkan pola berpikir yang positif kepada seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pola pikir dari setiap pegawai terus ditanamkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaannya saja, namun setiap pegawai ditanamkan pola berpikir untuk bekerja dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi orang lain dan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Hal inilah yang selama ini menjadi faktor pendukung dalam kaitannya ketercapaian kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menanamkan budaya kerja dan pola berpikir bekerja untuk menghasilkan suatu manfaat.

E. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh anggaran sebesar Rp14.708.811.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.510.358.196,00 atau 98,65% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun 2021 yakni anggaran sebesar Rp14.691.502.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.102.480.219,00 atau 95,99%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 15 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp14.049.021.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp14.708.811.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program yakni Program Pemeriksaan Keuangan Negara, yang kemudian dialokasikan untuk mencapai Indikator Kinerja yang ditargetkan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Rp4.694.152.000	Rp4.205.153.193	83,75%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Rp4.525.785.000	Rp4.168.653.193	100,00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rp598.483.000	Rp391.714.843	69,78%*
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Rp3.869.319.000	Rp3.512.191.443	100,68%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Rp0	Rp0	100,07%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Rp3.869.319.000	Rp3.512.191.443	100,51%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Rp1.310.046.000	Rp1.094.138.520	Memuaskan (4,80)
8	Hasil Evaluasi AKIP	Rp430.116.000	Rp355.214.843	AA (93,15)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Rp3.415.135.000	Rp2.533.199.392	90,27%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Rp144.629.000	Rp131.688.988	100,00%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Rp615.942.000	Rp415.161.179	Memuaskan (3,65)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Rp1.454.675.000	Rp1.225.827.508	100,00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	Rp1.526.406.000	Rp1.272.408.520	90,04%

*Data berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I

F. INOVASI

BPK perlu melakukan langkah inovasi dalam pelaksanaan tugas fungsinya untuk meningkatkan peranannya dalam pemeriksaan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, dengan adanya inovasi dapat meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh *stakeholder* sehingga dapat membangun rasa percaya yang lebih

kepada BPK. Hal ini tidak terkecuali dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melakukan langkah inovasi, baik dalam hal pemeriksaan maupun dalam hal pelayanan publik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Adapun inovasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. *Pemilihan dan penugasan Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dan pelaporan hasil pemeriksaan.*

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 23/SK/XIX.GOR/03/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pemilihan dan penugasan Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) sehingga *ouput* atas pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. *Pembuatan Video Podcast.*

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 40/SK/XIX.GOR/07/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pembuatan *video podcast*. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada para *stakeholder* dan membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* serta partisipasi dari *stakeholder* BPK maka diperlukan suatu media komunikasi yang menarik.

3. *Optimalisasi Portal Satuan Kerja*

Portal satuan kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu *tool* bagi pegawai pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan terkait sharing informasi. Portal perwakilan selain berfungsi sebagai media komunikasi melalui fitur *discussion board* dan media kolaborasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai media *file sharing/repository* untuk mendukung pengelolaan dokumen di satuan kerja.

BPK Perwakilan Gorontalo sebelumnya telah memiliki portal perwakilan, namun demikian tampilan situs, halaman situs, dan menu yang terdapat dalam

portal satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan dan perlu dibuat agar *user friendly*, serta penggunaannya belum optimal serta informasi di dalamnya belum terkini/mutakhir (*update*). Tujuan dari Optimalisasi Portal Satuan Kerja adalah untuk mengintegrasikan beberapa informasi terkait BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, berita prestasi kantor perwakilan, infografis tentang Provinsi Gorontalo dan sekitarnya, serta dokumen pemeriksaan. Seluruh informasi pada portal masing-masing perwakilan dapat digunakan oleh perwakilan lain diantaranya untuk kegiatan *benchmark* kegiatan pemeriksaan yang meliputi LHP, TLHP, Keruda, IHPS, dan KKP.

G. PENGHARGAAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama ini telah mendapat beberapa penghargaan baik dari internal maupun eksternal, antara lain:

1. Juara I pada Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021.
2. Juara I Tulisan Hukum Tingkat BPK Perwakilan Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021.
3. Juara III Pengelola Database Hukum Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021.
4. Juara III Tulisan Hukum Tingkat BPK Tahun 2021, yang diterima pada Oktober 2022.
5. Unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020, yang diterima pada Desember 2021.

BAB IV PENUTUP

A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM

Pada tahun 2022 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 97,87 di mana skor tersebut mengalami penurunan sebesar 1,64 jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja tahun 2021 sebelumnya sebesar 99,51.

B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR

Pencapaian skor tahun 2022 sebagai tahun ketiga periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan bahwa terdapat penurunan capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan tahun 2021. Akan tetapi, mayoritas Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tetap mengalami peningkatan selama tahun 2022. Hal ini ditandai dengan tercapainya delapan Indikator Kinerja dan hanya lima Indikator Kinerja yang belum terpenuhi. Adapun penjelasan ringkasnya sebagai berikut.

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang capaiannya masih di bawah target yaitu 83,75% dari 100%. Indikator ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 86,25%, Permasalahan yang dihadapi masih sama yaitu adanya catatan dari Direktorat EPP atas hasil LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan perbaikan lebih lanjut di tahun 2022 dengan cara meningkatkan *quality control*, *quality assurance*, dan *cross review* antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan capaiannya mencapai 100% sesuai dengan target sama seperti tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *quality control* dan *quality assurance*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan;
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan capaiannya hanya 69,78%, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 72,83% dan tidak mencapai target sebesar 75%. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kualitas rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan secara cepat oleh pihak pemerintah

daerah, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu untuk terus mendorong Pemerintah Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan surat kepada Kepala Daerah serta memaksimalkan aplikasi SiPTL. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mulai membuka kesempatan tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut;

4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional capaiannya memenuhi target sama seperti tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai 100,68%. Hal ini tercapai karena pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait pelaksanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman serta strategi nasional pencegahan korupsi. Untuk tahun-tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional;
5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan capaiannya 100,07% melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tetap secara konsisten berupaya untuk memenuhi setiap permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan;
6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal mencapai target, yaitu 100,51% dari target 100%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 telah melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga capaian indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,51%;
7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK capaiannya masih belum memenuhi target seperti tahun sebelumnya, yaitu hanya memperoleh nilai 4,80 dari target sebesar 5,00, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 4,41. Belum tercapainya target disebabkan karena masih ada aspek-aspek nilai dasar BPK yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di BPK Perwakilan

Provinsi Gorontalo, dan akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim;

8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP capaiannya telah melampaui target sama seperti tahun sebelumnya, yaitu mendapat nilai 93,15 (AA) dibandingkan dengan target sebesar 87,00 (A). Hal ini dimungkinkan karena penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dilakukan secara tertib serta memperhatikan arahan-arahan dari Itama. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga secara intensif menjalin komunikasi dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, capaiannya adalah 90,27%, yang mana tidak mencapai target ditetapkan sebesar 97%. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan TI dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan belum berjalan secara optimal, terutama dalam pemanfaatan layanan aplikasi SiAP untuk penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan aplikasi Jasmin untuk tindak lanjut surat masuk;
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, capaiannya adalah 100,00% mencapai target sebesar 100%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan usulan *best practice* terkait optimalisasi portal satuan kerja serta melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait diklat LKPD, forum berbagi pengetahuan, reвью pasca aktivitas, dan pelaksanaan mentoring CPNS;
11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, capaiannya adalah 3,65 dan tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 3,80. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 senilai 3,89. Capaian ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti entitas, media, serta pihak-pihak lain seperti penyedia jasa serta instansi vertikal lainnya. Hal ini akan terus ditingkatkan lagi pada tahun 2023;
12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, capaiannya adalah 100%, yang mana mencapai target yang diharapkan sebesar 100%. Hal ini dimungkinkan karena adanya pelaksanaan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan

LKPD serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai;

13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran, capaiannya melampaui target sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 90,04% dibandingkan target 88%. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IK TAHUN 2022

Kendala/hambatan dalam pencapaian IK tahun 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Tidak tercapainya target IK 1 terjadi karena masih kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga meskipun telah diupayakan *quality assurance*, *quality control*, *cross review* dan diskusi terarah, namun Direktorat EPP masih menemukan catatan-catatan yang harus diperbaiki lagi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Atas kelemahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan proses penyusunan secara lebih intens, mengoptimalkan upaya *quality assurance*, *quality control*, *cross review* dan diskusi terarah agar LHP yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

2. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IK 3 tidak tercapai karena selama tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kualitas rekomendasi sehingga pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut. Selain itu, kurangnya komunikasi dan komitmen pemerintah daerah juga membuat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi terhambat, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mulai mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap

triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

3. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Target IK 7 masih belum tercapai karena pegawai masih belum familiar dengan survei yang dikirimkan via *e-mail* BPK sehingga masih memerlukan sosialisasi yang lebih memadai serta pendampingan pegawai ketika mengisi kuesioner dari pihak ketiga. Hal ini akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim. Selain itu, akan ditingkatkan komunikasi dengan LO dari pihak Direktorat PSMK untuk menjamin agar seluruh pegawai penerima survei telah mengisi survei yang dikirimkan.

4. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tidak tercapainya target IK 9 terjadi karena masih belum optimalnya pemanfaatan layanan aplikasi yang telah disediakan oleh BPK untuk seluruh pegawai. Hal ini terutama terlihat dari masih kurang optimalnya dalam pemanfaatan layanan aplikasi SiAP untuk penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan aplikasi Jasmin untuk tindak lanjut surat masuk.

5. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Target IK 11 masih belum tercapai karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sehingga mengurangi intensitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK terutama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, serta menjaga kualitas hubungan serta komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo, termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.

D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2023

Strategi dan rencana aksi dalam pemenuhan target tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan surat kepada Kepala Daerah serta memaksimalkan aplikasi SiPTL;
3. Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut;
4. Memberikan rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive* (SMART) untuk dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa dan berdampak positif pada capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi.
5. Terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarkan setiap tahun, serta melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim;
6. Meningkatkan komunikasi dengan pihak Direktorat PSMK untuk memastikan bahwa seluruh pegawai penerima survei via *e-mail* telah melaksanakan kewajibannya mengisi kuesioner implementasi nilai dasar BPK;
7. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi untuk pemanfaatan layanan TI secara optimal sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
8. Terus melaksanakan proses bisnis yang telah menghasilkan capaian sesuai target atau melampauinya, sambil terus meningkatkan hal-hal yang masih bisa diperbaiki ke depannya; dan

9. Terus berkomunikasi dengan Itama selaku pengawas internal BPK terkait penyempurnaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta Unit Kerja terkait seperti Direktorat EPP dan Direktorat PSMK agar capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

LAMPIRAN

Lampiran 1

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember 2022	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan LKPD serta PDDT Banparpol.
								<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan LKPD serta PDDT Banparpol.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan; Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; dan Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan; Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; dan Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 LKPD dan LFAR TA 2021; Melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada tujuh entitas dengan memedomani P2; dan Melaksanakan pemeriksaan LFAR pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan memedomani P2. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP LKPD TA 2021 pada tujuh entitas dan LFAR TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2021 dan satu LHP LFAR ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja. <p>Triwulan III:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 Tematik Nasional; dan Melaksanakan pemeriksaan Tematik Nasional dengan memedomani P2.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP Tematik Nasional; dan Menyerahkan LHP Tematik Nasional ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2022	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; Pelaksanaan pembahasan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL; dan Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL.
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; Pelaksanaan pembahasan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL; dan Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2022	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.
								Triwulan II:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tematik Nasional							<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan.
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional; dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan terinci tematik nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2022	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada. Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2022	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeriksaan Tematik Lokal							<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's; dan Melakukan perubahan atas RKP untuk memasukkan anggaran jika ada pemeriksaan tematik lokal. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan atas topik yang akan dijadikan tematik lokal dengan memperhatikan ketersediaan pemeriksa; dan Melakukan pemeriksaan tematik lokal. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan LHP tematik lokal.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	0	0	0	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Triwulan IV</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	0	0	0	A (88,00)	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun nonpemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, Jasmin, dan SISDM. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun nonpemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, Jasmin, dan SISDM. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun nonpemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, Jasmin, dan SISDM. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun nonpemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, Jasmin, dan SISDM.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	12,5%	50%	100%	Desember 2022	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait KTF <i>Big Data Analytics</i> atau Pemeriksaan Investigatif . <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Diklat Pemeriksaan Kinerja. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Revbang. Untuk usulan <i>Best Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan <i>sharing knowledge</i> pada pihak lain.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	0	0	0	Memuaskan (3,80)	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD dan LFAR untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan kinerja untuk menyampaikan kode

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner <i>kepuasan</i> kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	Januari: 25% Februari: 50% Maret: 70%	April: 72% Mei: 75% Juni: 80%	Juli: 82% Agustus: 85% September: 90%	Oktober: 92% November: 95% Desember: 100%	Desember 2022	<p>Triwulan I :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun; Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Triwulan II :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun; Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Triwulan III :</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun; Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
								<p>Triwulan IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun; Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember 2022	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.